

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menurunkan Angka Anak Tidak Sekolah Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Nurhaliza ahmad¹⁾, Muhammad Ikbali²⁾, Sundari³⁾

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Korespondensi author: Nurhalizaahmad60@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), khususnya kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB), di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah diwujudkan melalui pendataan, verifikasi data, pembangunan Sekolah Rakyat, dan pelibatan stakeholder. Analisis memperlihatkan bahwa indikator Penetapan Tindakan Strategis paling dominan (44%), diikuti oleh Alokasi Sumber Daya (22%), kemudian Penetapan Tujuan Jangka Panjang (18%), dan terakhir Evaluasi serta Penyesuaian Strategi (14%). Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah daerah dan dukungan kebijakan, sedangkan hambatan meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur pendidikan, akurasi data, rendahnya motivasi anak, serta pengaruh budaya masyarakat. Kesimpulannya, meskipun pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi, strategi yang dijalankan belum optimal, sehingga perlu penguatan sistem pendataan, peningkatan anggaran, pendekatan sosial psikologis, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak.

Kata kunci: Anak Tidak Sekolah, Strategi Pemerintah Daerah, Pendidikan, NVivo

Abstract

This study analyzes the local government's strategy in reducing the number of out-of-school children (ATS), particularly those in the category of those who have never attended school (BPB), in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. The method used is descriptive qualitative with observation techniques, in-depth interviews, and documentation, as well as data analysis using NVivo. The results show that the government's strategy is realized through data collection, data verification, the construction of Public Schools, and stakeholder involvement. The analysis shows that the Strategic Action Determination indicator is the most dominant (44%), followed by Resource Allocation (22%), then Long-Term Goal Setting (18%), and finally Strategy Evaluation and Adjustment (14%). The main supporting factors are local government commitment and policy support, while obstacles include budget limitations, educational infrastructure, data accuracy, low child motivation, and the influence of community culture. In conclusion, although the local government has a high commitment, the strategy implemented is not optimal, so it is necessary to strengthen the data collection system, increase the budget, a social psychological approach, and continuous evaluation to ensure the sustainability of children's education.

Keywords: Out-of-School Children, Local Government Strategy, Education, NVivo

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus pilar utama pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi diri serta berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban moral dan konstitusional negara.

Meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan, persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. ATS mencakup anak yang putus sekolah (DO), lulus tidak melanjutkan (LTM), serta belum pernah bersekolah (BPB). Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat sekitar 1,6 juta anak usia SMP di Indonesia yang tidak sekolah, dengan persentase tertinggi di Papua Barat (29,1%), Maluku (20,6%), dan Kalimantan Barat (18,9%). Faktor penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan biaya, akses pendidikan yang tidak merata, rendahnya kesadaran orang tua, hingga faktor sosial budaya seperti pernikahan dini.

Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), khususnya Kecamatan Maritengngae, fenomena ATS memiliki karakteristik unik. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap tahun 2025 menunjukkan bahwa kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) mendominasi dibandingkan DO maupun LTM. Misalnya, di Desa Lautang Benteng terdapat 68 anak BPB dan di Rijang Pittu 66 anak, jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa di daerah yang relatif maju dengan akses pendidikan cukup baik, justru dominan anak yang sama sekali belum pernah bersekolah, bukan anak yang putus sekolah? Gap ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam tahap awal akses pendidikan dasar, bukan semata masalah keberlanjutan sekolah.

Keunikan ini tidak dapat dilepaskan dari latar sosial-budaya masyarakat Maritengngae. Misalnya, keberadaan salah satu budaya yaitu To'lotang (Bahfiarti et al., 2021) dengan tradisi dan sistem nilai yang khas, turut memengaruhi pola pikir dan prioritas keluarga terhadap pendidikan formal. Dalam beberapa kasus, norma budaya dan orientasi sosial lebih menekankan pada peran anak dalam keluarga atau komunitas daripada melanjutkan pendidikan. Faktor ini memperkuat dominasi kategori BPB, karena sebagian anak tidak pernah tersentuh layanan pendidikan sejak awal.

Sejumlah penelitian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menekan angka anak tidak sekolah. Penelitian (Andayani et al., 2021) menunjukkan bahwa efektivitas strategi pemerintah daerah sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan masyarakat. Hal senada diungkapkan (Lorensa et al., 2023) yang menekankan pendekatan kolaboratif berbasis komunitas dalam penanganan ATS. Sementara itu, penelitian (Budiarti, Noviani, Setyawati, 2023) mengidentifikasi faktor ekonomi, motivasi rendah, serta permasalahan keluarga sebagai penyebab utama anak tidak sekolah.

Pemerintah daerah Sidrap telah melaksanakan berbagai program, seperti Sekolah Rakyat, Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), Jemput Bola Anak Putus Sekolah, Program Paket A, B, dan C, serta bantuan finansial melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Upaya tersebut juga didukung oleh kerja sama dengan PKBM dan sosialisasi wajib belajar. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran, akurasi data yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan dominasi kategori BPB, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah bukan hanya mengembalikan anak ke sekolah, tetapi memastikan anak-anak yang sama sekali belum pernah bersekolah dapat memperoleh akses pendidikan pertama mereka.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka anak tidak sekolah, khususnya kategori BPB, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, sekaligus

manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipilih secara purposive karena memiliki jumlah anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) tertinggi dibandingkan kategori ATS lainnya seperti DO (Drop Out) dan LTM (Lulus Tidak Melanjutkan). Selain itu, penelitian juga dilakukan di Satuan Kantor Pemerintah Daerah (SKPD), khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, dengan waktu penelitian berlangsung selama dua bulan, yaitu Januari hingga Februari 2026. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara mendalam strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka anak tidak sekolah, khususnya kategori BPB. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan data empiris di lapangan (Sugiyono, 2013). Fokus penelitian mengacu pada teori strategi Alfred D. Chandler (1962), yang menekankan pentingnya penetapan tujuan jangka panjang, tindakan strategis, dan alokasi sumber daya.

Dalam penelitian ini, perangkat lunak NVivo digunakan sebagai alat bantu dalam proses analisis data kualitatif. Penggunaan NVivo bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, pengelompokan, dan interpretasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemanfaatan perangkat lunak ini membantu meningkatkan ketepatan dalam proses pengkodean data, memfasilitasi pembentukan kategori atau tema penelitian (*node*), serta menyajikan berbagai bentuk visualisasi hubungan antar tema. Dengan demikian, penggunaan NVivo dapat mendukung akurasi, transparansi, dan keterlacakan proses analisis data penelitian.

hal ini diperkuat oleh studi (Silva et al., 2025) yang menyatakan bahwa perangkat lunak NVivo mampu meningkatkan akurasi proses *coding*, mempermudah pembentukan tema-tema analisis melalui *node*, serta memungkinkan visualisasi hubungan antarkonsep melalui berbagai fitur seperti *query* dan peta konseptual (*conceptual maps*). Selain itu, NVivo juga dapat mengolah berbagai jenis data, seperti teks, gambar, diagram, audio, video, maupun halaman web.

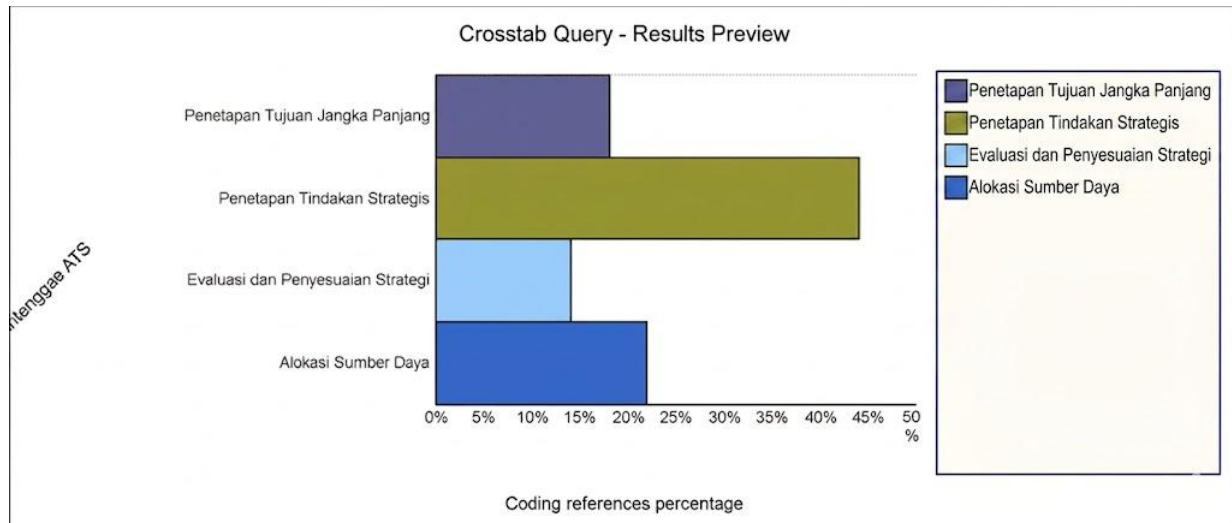
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di desa/kelurahan Kecamatan Maritengngae dalam (Sugiyono, 2013), wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur Esterberg serta dokumentasi berupa catatan, foto, dan dokumen resmi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik snowball sampling, melibatkan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kecamatan Maritengngae, serta tokoh pelaksana program ATS. Analisis data dilakukan secara interaktif menurut Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan dukungan NVivo untuk pengkodean dan visualisasi hubungan antarkonsep. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber, tempat, dan waktu (Sugiyono, 2013), sehingga kredibilitas hasil penelitian dapat terjaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Maritengngae telah dilaksanakan melalui berbagai program, seperti pendataan, verifikasi data, pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelibatan stakeholder. Analisis NVivo menunjukkan bahwa indikator Penetapan Tindakan Strategis menjadi aspek paling dominan dengan persentase 44%, diikuti oleh Alokasi Sumber Daya (22%), Penetapan Tujuan Jangka Panjang (18%), dan Evaluasi serta Penyesuaian Strategi (14%).

Dalam analisis menggunakan perangkat lunak NVivo, nodes atau kategori pengkodean dibentuk berdasarkan derivasi teori Chandler, yaitu tujuan jangka panjang, tindakan strategis, alokasi sumber daya, serta evaluasi dan penyesuaian strategi. Hasil pengkodean menunjukkan bahwa tindakan strategis memperoleh persentase tertinggi, yakni 44% dari keseluruhan coding. Angka ini merepresentasikan intensitas pembahasan informan dalam transkrip wawancara, di mana sebagian besar narasi mereka menekankan pada program nyata seperti Gerakan Kembali

Sekolah, Sekolah Rakyat Terintegrasi, dan sosialisasi pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan (Yuliana & Kristinawati, 2022) yang menekankan bahwa komitmen pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka ATS. Lebih lanjut, penelitian (Silva et al., 2025) menegaskan bahwa penggunaan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo dapat meningkatkan akurasi pengkodean dan transparansi analisis, terutama ketika kategori dibentuk berdasarkan teori yang jelas. Temuan ini diperkuat oleh (Widarthi & Jasmina, 2025) yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang terencana dengan baik berpengaruh signifikan terhadap efektivitas strategi daerah.

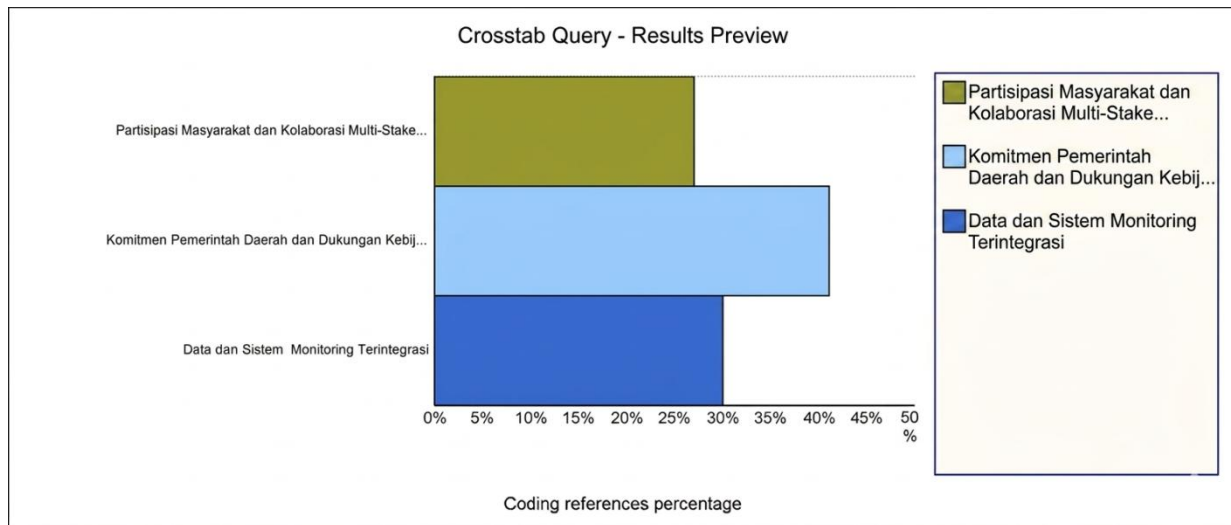


Gambar 1.1 Hasil analisis strategis pemerintah di Nvivo

Dominasi tindakan strategis (44%) menunjukkan bahwa perhatian informan lebih banyak tertuju pada program nyata seperti Gerakan Kembali Sekolah dan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Namun, angka ini bukan ukuran keberhasilan, melainkan intensitas pembahasan dalam wawancara. Jika dikaitkan dengan teori Chandler (1962), strategi memang harus diterjemahkan ke dalam tindakan, tetapi kelemahan terlihat pada aspek evaluasi yang rendah. Rendahnya persentase evaluasi (14%) mengindikasikan birokrasi Sidrap cenderung *project-oriented*—lebih fokus pada pelaksanaan program dan penghabisan anggaran daripada monitoring keberlanjutan. Hal ini konsisten dengan penelitian (Andayani et al., 2021) yang menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan evaluasi berkelanjutan untuk efektivitas kebijakan pendidikan.

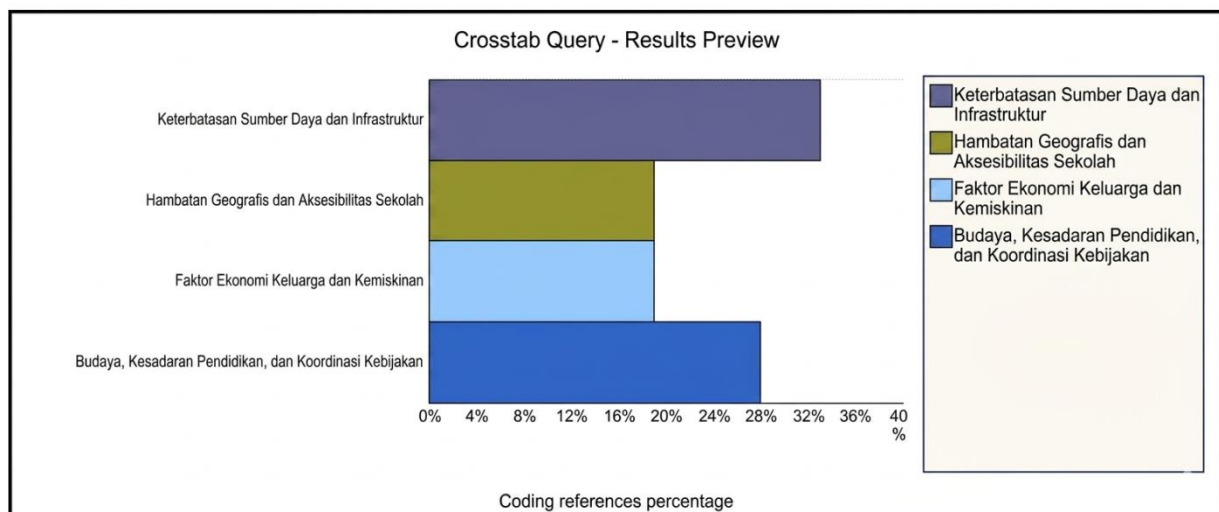
Rendahnya capaian aspek Evaluasi (14%) menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sidrap masih didominasi pendekatan berorientasi proyek (*project-oriented*), di mana keberhasilan program lebih banyak diukur dari terlaksananya kegiatan, jumlah peserta, penyediaan sarana, dan penyerapan anggaran dibandingkan dampaknya terhadap perubahan perilaku pendidikan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan perilaku birokrasi di tingkat kecamatan dan daerah yang cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif dan pencapaian indikator kinerja yang mudah dilaporkan kepada atasan. Dalam praktiknya, aparat lebih terdorong menghasilkan bukti fisik program dan laporan kegiatan karena aspek tersebut menjadi dasar penilaian kinerja birokrasi, sementara evaluasi terhadap perubahan nilai, motivasi keluarga, dan partisipasi pendidikan masyarakat membutuhkan waktu lebih panjang serta sulit diukur secara kuantitatif. Temuan ini sejalan dengan (Salomo, 2023) yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia masih didominasi orientasi administratif sehingga evaluasi lebih berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban daripada instrumen pembelajaran kebijakan. Akibatnya, evaluasi Program Sekolah Rakyat belum mampu menangkap secara mendalam hambatan sosial-budaya yang menjadi akar rendahnya partisipasi

pendidikan, sehingga program cenderung menghasilkan capaian administratif tanpa diikuti perubahan sosial yang signifikan.



Gambar 1.2 Hasil analisis faktor pendukung di Nvivo

Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah daerah (41,86%), diikuti oleh data dan sistem monitoring (30,23%), serta partisipasi masyarakat (27,91%). Triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa komitmen pemerintah cukup tinggi, misalnya melalui program Sekolah Rakyat. Namun, jika dikaitkan dengan teori tata kelola publik (Widarthi & Jasmina, 2025), komitmen saja tidak cukup tanpa tata kelola anggaran dan monitoring yang baik. Data yang belum akurat membuat strategi sulit tepat sasaran, sementara partisipasi masyarakat masih rendah sehingga program berjalan top-down. Temuan ini konsisten dengan (Lorenza et al., 2023) yang menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis komunitas dalam penanganan ATS.



Gambar 1.3 Hasil analisis faktor penghambat di Nvivo

Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran, infrastruktur, kualitas data, motivasi anak, serta faktor budaya. Triangulasi menunjukkan bahwa masalah anggaran dan data diungkapkan baik oleh pejabat dinas maupun pelaksana program, sementara hambatan budaya muncul dari komunitas budaya yang masih memandang pendidikan formal bukan prioritas. Jika

dikaitkan dengan konsep inklusivitas pelayanan publik dan sosiologi pendidikan, kebijakan adaptif seperti Sekolah Rakyat belum mampu mengintervensi hambatan budaya karena lebih berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik daripada perubahan norma sosial. Penelitian (Budiarti, Noviani, Setyawati, 2023) juga menegaskan bahwa faktor keluarga dan budaya menjadi penentu utama partisipasi sekolah anak. Dengan demikian, strategi pemerintah Sidrap masih menghadapi tantangan besar dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas sosial-budaya lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Maritengngae telah dilakukan melalui berbagai program seperti pendataan, verifikasi data, pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelibatan stakeholder. Analisis menunjukkan bahwa indikator penetapan tindakan strategis menjadi aspek paling dominan, namun efektivitas strategi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, infrastruktur pendidikan yang belum memadai, kualitas data yang kurang akurat, rendahnya motivasi anak, serta pengaruh budaya masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi, strategi yang dijalankan belum sepenuhnya optimal dalam menekan angka ATS.

Untuk menekan jumlah anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) di Kecamatan Maritengngae, Pemerintah Kabupaten Sidrap perlu menerapkan pendekatan budaya yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat dari budaya To'lotang sebagai agen perubahan di lingkungan komunitas. Sosialisasi pentingnya pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pertemuan adat, dan forum komunitas yang selama ini menjadi ruang interaksi masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan bersama sekolah, pemerintah desa/kelurahan, dan pendamping sosial perlu melakukan *home visit* kepada keluarga BPB untuk mengidentifikasi penyebab anak tidak bersekolah serta memberikan pendampingan kepada orang tua. Pendekatan ini penting karena hambatan pendidikan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan akses, tetapi juga oleh nilai dan persepsi budaya yang masih memandang pendidikan formal belum menjadi prioritas utama bagi sebagian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, L. D., Yusuf, M., Mambang, M., & Toun, N. R. (2021). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Ats) Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*. 8(2), 32–40. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v8i2.3258>
- Bahfiarti, T., Chotimah, I., & Ilmi, D. N. (2021). *Analisis Komunikasi Keluarga dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Budaya To Lotang di Kabupaten Sidrap*. 15(2), 169–180.
- Budiarti, Noviani, Setyawati, T. (2023). *Strategi penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Sragen*.
- Lorensa, D., Rohady Ramadhan, M., & Jabbar, A. (2023). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Strategi Pemerintah Dereah Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. 10, 150–158.
- Salomo, R. V. (2023). *Progress and Institutional Challenges on Local Governments Performance Accountability System Reform in Indonesia*. December, 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>
- Silva, J. Da, Costa, F. Da, Melianto, D., & Suparta, M. (2025). *Implementasi Metode Analisis Menggunakan NVivo dalam Penelitian Kualitatif*. 3.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta CV.
- Widarthi, Y., & Jasmina, T. (2025). *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia Secondary Education in Indonesia*. 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.11594/jesi.05.02.05>
- Yuliana, A. I., & Kristinawati, W. (2022). *Jurnal sosial humaniora dan pendidikan*. 1(1).